

PARTICIPATORY GOVERNANCE

Course Title : Participatory Governance
Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily M.Si

Lecturer :
ace.hasan@gmail.com
: Facebook: acehasansyadzily
Twitter: acehasan76



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN – JAKARTA
2016**

Participatory Governance?

Suatu pemerintahan yang menempatkan warga (non-pemerintah) sebagai individu atau yang bernaung dalam sebuah organisasi sosial (*civil society*) sebagai stakeholders dalam pengambilan kebijakan publik, baik ditingkat lokal maupun nasional, dalam sebuah negara yang demokratis.



Mengapa Partisipasi dalam Pembangunan penting?

1. Masyarakat bukanlah sebagai hamba (*client*) melainkan sebagai warga (*citizen*).
2. Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
3. Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat.
4. Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif menentukan kebijakan

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Karena melekat, maka hak ini tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang untuk duduk dalam lembaga pemerintahan;
2. Partisipasi langsung dapat menutupi kegagalan demokrasi perwakilan, menjadikan partisipasi agar lebih bermakna;
3. Semakin diterimanya partisipasi sebagai instrumen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
4. Dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan lembaga pemerintah;

Distorsi Partisipasi



- Pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek kebijakan pemerintah.
- Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikursertaan masyarakat mengambil bagian (*take part*) untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan dan program-program yang diprakarsai pemerintah (mobilisasi).
- Perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah melibatkan masyarakat.

Substansi Partisipasi

Voice, yaitu hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.

Access, yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik.



Pergeseran dalam Partisipasi



TUJUH PRINSIP PARTISIPASI

1. **Cakupan.** Semua orang, atau wakil -wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil suatu keputusan atau proses pembangunan.
2. **Kesetaraan dan Kemitraan** (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. **Transparansi.** Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. **Kesetaraan Kewenangan** (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

TUJUH PRINSIP PARTISIPASI

5. **Kesetaraan Tanggung Jawab** (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. **Pemberdayaan** (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain
7. **Kerjasama**. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.

MANFAAT PARTISIPASI

1. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan desentralisasi.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri berkesinambungan.
3. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggung jawaban keputusan sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat (terberdayakan).
4. Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat dan lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat.
5. Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi dan wewenang.

KRITIK TERHADAP PARTISIPASI

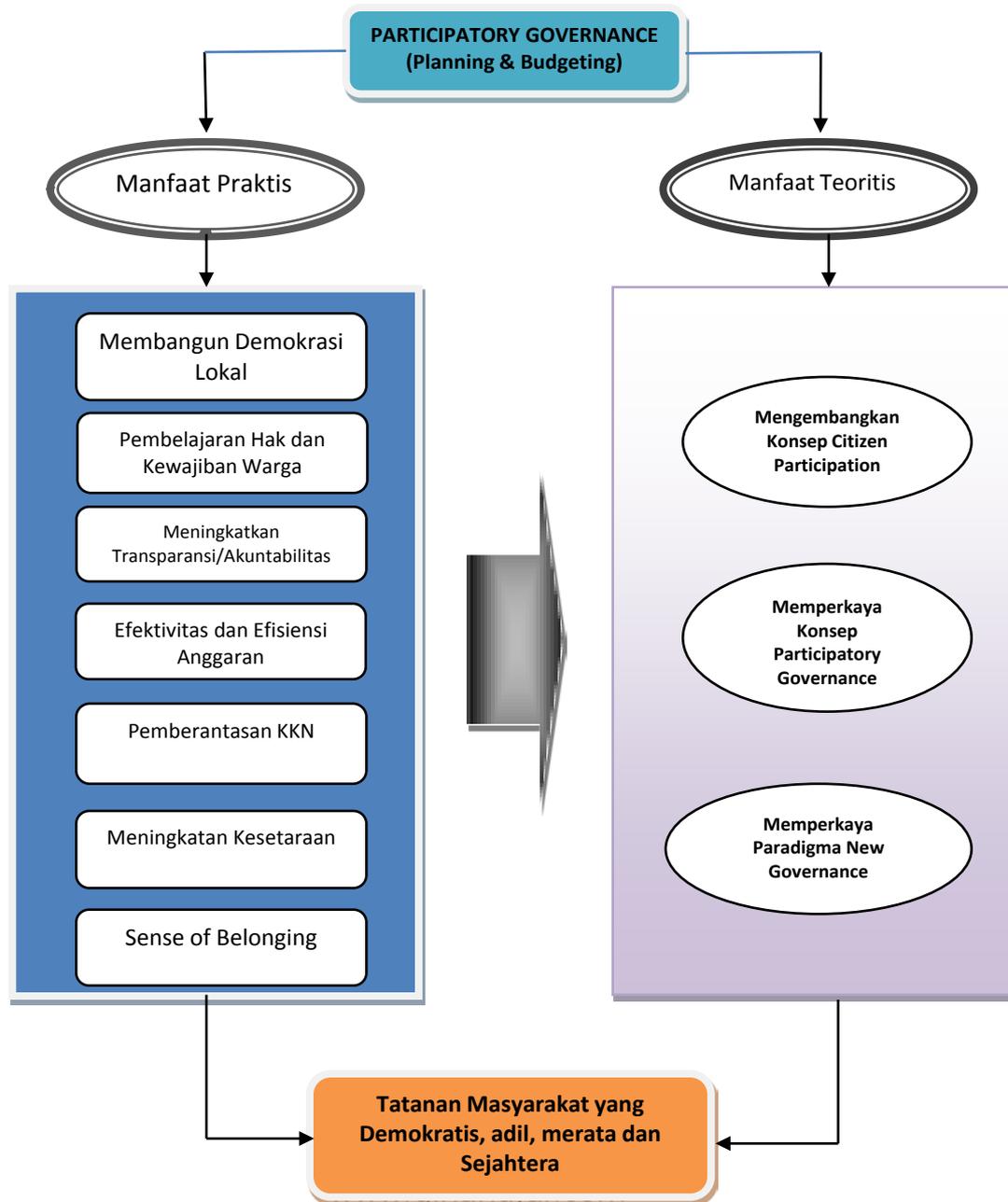
1. Meningkatnya biaya setiap proses partisipasi karena melibatkan banyak pihak yang beragam latar belakang pendidikan dan kemampuan;
2. Waktu pengambilan keputusan menjadi lebih lama;
3. Rentan terhadap konflik vertikal dan horizontal apalagi negara-negara yang masih dalam proses transisi;
4. Terlalu idealis;
5. Menambah beban pada orang miskin;
6. Masyarakat sulit diajak berdiskusi dan menyelesaikan hal-hal yang rumit;

TANGGA, KARAKTERISTIK & TUJUAN PARTISIPASI

No	Tangga	Karakteristik	Tujuan/Sasaran
1	Manipulatif	Partipisasi untuk alasan eksploitatif. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan tapi tidak memiliki target akhir. Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Inisiatifnya karena pemerintah hanya ingin mendapatkan persetujuan dan memperoleh sumber dana serta sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh tenaga kerja murah atau gratis - Mobilisasi dana - Memenuhi tuntutan lembaga donor - Memperoleh keuntungan politis
2	Informasi	Masyarakat diberikan informasi tentang tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan pemerintah. Kebijakan secara eksklusif dibuat pemerintah, tidak transparan dan akuntabel. Tidak ada upaya untuk dialogis dan adanya umpan balik dari masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap program pembangunan - Untuk tujuan mobilisasi dana dalam penyediaan barang publik
3	Konsultatif	Pemerintah mengkomunikasikan kepada masyarakat berbagai program pembangunan yang telah disusun. Pemerintah meminta masukan kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Masukan-masukan tersebut belum tentu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengurangi resistensi • Meningkatkan rasa memiliki • Meningkatkan keberlanjutan • Efisiensi

TANGGA, KARAKTERISTIK & TUJUAN PARTISIPASI

No	Tangga	Karakteristik	Tujuan/Sasaran
4	Kooperatif	Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam sebuah aliansi untuk meningkatkan responsiveness kebijakan pembangunan. Masyarakat dilibatkan sejak dari tahap awal. Umumnya lebih mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang rentan dan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan paling utama meningkatkan kapasitas masyarakat - Meningkatkan rasa memiliki - Meningkatkan keberlanjutan - Efisiensi - Meningkatkan kesetaraan
5	Partnership	Masyarakat dalam posisi yang mampu duduk bersama membahas, menyusun dan mengawasi proses pengambilan kebijakan dan pemerintah membahas inisiatif secara seksama aspirasi masyarakat. Pemerintah responsif terhadap aspirasi dan masukan masyarakat. Masyarakat juga sangat aktif melakukan kontrol (citizen control) terhadap proses pelaksanaan kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan (empowering) masyarakat - Masyarakat mampu mengelola sendiri urusan publik - <i>Cost recovery</i>



Tugas Kelompok Mahasiswa

- Untuk memperdalam isu tentang Participatory Governance secara teoritis dan praktek, mahasiswa diberikan tugas untuk membaca dan menelaah secara mendalam buku yang berjudul: **Deepening Democracy (Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance)**, ARCHON FUNG and ERIK OLIN WRIGHT, Verso, 2003
- Dalam melaksanakan tugas ini, setiap mahasiswa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Setiap mahasiswa yang menjadi anggota kelompok harus menguasai materi yang dipresentasikan;
 - Setiap mahasiswa harus mampu mempresentasikan materi secara bergiliran dengan anggota kelompok lainnya.
 - Anggota kelompok lainnya diharapkan untuk memberikan tanggapan dan dapat bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan tugasnya;
 - Seminar kelas dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Setiap kelompok menyampaikan presentasi selama 60 menit, yang terdiri atas: 30 menit Presentasi dan 30 menit tanggapan, tanya jawab dan diskusi mendalam;
 - Soft copy power point presentation dikirimkan ke email:
 - acehasan76@yahoo.co.id
 - All students belonging to other groups.

Tugas Kelompok Mahasiswa

KELOMPOK	TOPIK	REFERENSI
I	Pengalaman Participatory Governance di Porto Algero, Brasil	Thinking about Empowered Participatory Governance Hal: 3 Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment Hal: 45
II	Pengalaman Participatory Governance di Kerala, India	Thinking about Empowered Participatory Governance Hal: 3 Democracy and Development: Decentralized Planning in Kerala Hal: 77
III	Pengalaman Participatory Governance di Chicago, AS	Thinking about Empowered Participatory Governance Hal: 3 Deliberative Democracy, Chicago Style: Grass-roots Governance in Policing and Public Education Hal: 111
IV	Pengalaman Participatory Governance tentang Konservasi di AS	Thinking about Empowered Participatory Governance Hal: 3 Habitat Conservation Planning , Hal: 144